

Strategi Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Inovasi Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Muh. Wahyu. M¹, Haeruddin Syarifuddin², Sandi Lubis³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: ¹muhwahyum7@gmail.com, ²heru.stisip@gmail.com, ³sandi.lubis7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi manajemen pemerintah daerah terhadap peningkatan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka dari 39 responden di Bapperida. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliabel. Analisis regresi mengungkapkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi daerah ($R^2 = 0,811$). Uji-t dan uji-F memperkuat bahwa seluruh variabel independen secara simultan memberikan kontribusi signifikan. Temuan ini mendukung teori George R. Terry dan pendekatan *Regional Innovation System* yang menekankan pentingnya sinergi manajerial dalam tata kelola publik. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menekankan perlunya integrasi fungsi manajemen secara strategis untuk memperkuat kapasitas inovasi daerah. Namun, keterbatasan studi terletak pada ruang lingkup wilayah dan pendekatan kuantitatif yang belum menangkap aspek kontekstual secara menyeluruh. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan mixed methods dan cakupan wilayah yang lebih luas untuk hasil yang lebih mendalam dan generalisabel.

Kata Kunci: Strategi Manajemen, Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah.

Abstract

This research provides an empirical contribution to the strengthening of strategic governance-based innovation policies, and can serve as a practical reference for other regions facing similar innovation problems. This study aims to analyze the effect of local government management strategies on increasing regional innovation in Sidenreng Rappang Regency. Using a quantitative approach with descriptive methods, data was collected through observation, questionnaires, and literature studies from 39 respondents at Bapperida. The results of validity and reliability tests showed that the instruments used were valid and reliable. Regression analysis revealed that planning, organizing, directing and supervising have a positive and significant effect on regional innovation ($R^2 = 0.811$). The t-test and F-test reinforced that all independent variables simultaneously contributed significantly. These findings support George R. Terry's theory and the Regional Innovation System approach that emphasizes the importance of managerial synergy in public governance. The practical implications of the results emphasize the need for strategic integration of management functions to strengthen regional innovation capacity. However, the limitations of the study lie in the scope of the region and the quantitative approach that has not captured contextual aspects thoroughly. It is recommended for future research to use a mixed methods approach and a wider area coverage for more in-depth and generalizable results.

Keywords: Management Strategy, Regional Innovation, Local Government.

PENDAHULUAN

Inovasi daerah merupakan instrumen strategis yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing wilayah di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas pembangunan yang terus berkembang (Handayani et al., 2024). Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan strategi manajemen inovasi yang efektif guna memperkuat pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut teori *Economic Development* dari Schumpeter, inovasi dipandang sebagai proses penciptaan nilai baru yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing daerah (Bazhal, 2016). Selain itu, konsep *Regional Innovation System (RIS)* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong ekosistem inovasi yang berkelanjutan di tingkat regional (Witjaksono et al., 2020). Dalam konteks manajemen, teori George R. Terry menjelaskan bahwa pencapaian inovasi yang berkelanjutan hanya dapat dilakukan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang sinergis dan terstruktur (Syahputra & Aslami, 2023).

Meskipun berbagai teori dan konsep telah dikembangkan, kajian literatur menunjukkan adanya keterbatasan dalam pembahasan strategi implementasi inovasi daerah yang kontekstual dan spesifik terhadap karakteristik lokal. Misalnya, penelitian (Rahmanda, 2023) menyoroti pentingnya peran kelembagaan di Kota Banda Aceh, namun belum menggali strategi manajerial secara mendalam. Demikian pula, (Maninggara et al. 2023) mengembangkan instrumen pengukuran inovasi tanpa menelaah aspek strategi manajemen pemerintah daerah secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi dengan analisis strategi manajemen inovasi yang aplikatif dan disesuaikan dengan potensi serta tantangan unik di setiap daerah.

Sebagai landasan regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mendefinisikan inovasi daerah sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan daya saing daerah. Peraturan ini secara spesifik mengatur implementasi sistem informasi di tingkat daerah, memberikan pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Farhan, 2023). Tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan daya saing (Afifah et al., 2023).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 memberikan mandat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai upaya mendukung, mengawasi, dan mempromosikan inovasi pemerintah daerah melalui platform *Indeks Government Award (IGA)* (Rahmanda, 2022). IID dirancang untuk menyebarkan tingkat inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik, mendorong pemerintah daerah mengembangkan inovasi yang meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan daya saing daerah (Fitri & Pradana, 2022). Inovasi daerah telah menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi pelayanan publik, khususnya di tengah tantangan globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang (Febrianti & Fanida, 2022). Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan strategi manajemen inovatif sebagai respons terhadap kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan teknologi (Aji Nugroho et al., 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 mengenai Indeks Inovasi Daerah di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar menempati peringkat tertinggi dengan skor inovasi sebesar 70,15, diikuti oleh Pangkajene dan Kepulauan (62,48) serta Kota Parepare (57,85). Kabupaten/kota lain yang juga mencatatkan skor tinggi antara lain Kota Palopo (55,92) dan Luwu Timur (55,29). Di sisi lain, Sidenreng Rappang berada di posisi ke-20 dengan skor 34,33, sedikit lebih rendah dari Kabupaten Gowa (40,01) dan Maros (40,84), yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan tingkat inovasi di wilayah tersebut. Sementara itu, empat kabupaten dengan skor inovasi terendah adalah Tana Toraja (15,32), Enrekang (13,6), Toraja Utara (12,9), dan Jeneponto (12,6). Data ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam tingkat inovasi antar daerah di Sulawesi Selatan, yang seharusnya menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inovatif di masa depan.

Observasi di Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang mengungkapkan bahwa ketiadaan perencanaan inovasi yang sistematis, khususnya tidak adanya Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa), menjadi kendala utama dalam peningkatan inovasi. Pelaksanaan kebijakan inovasi yang sporadis dan tidak terintegrasi menunjukkan kelemahan dalam aspek perencanaan strategis, sebagaimana ditekankan oleh teori manajemen George R. Terry (Ilham Syukri, 2023). Kondisi ini menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam merespon tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi secara efektif melalui inovasi yang terarah dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan dan salah satu komponen utama dalam inovasi daerah, SIDA sering kali dikaitkan dengan perencanaan pembangunan suatu wilayah. Perencanaan tersebut berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Menurut (Wismono et al., 2019), penguatan SIDA melalui penyusunan *Road Map* SIDA dapat menciptakan sistem inovasi daerah yang terintegrasi dan selaras dalam pelaksanaan inovasi di wilayah tersebut. Selain itu, *Road Map* SIDA memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan inovasi daerah melalui pengelolaan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah yang bertugas dan berkuasa dalam meningkatkan inovasi daerah, dinilai belum menjalankannya secara optimal. Hal ini terlihat dari Rendahnya skor Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023, serta ketiadaan dokumen perencanaan seperti *Road Map* Sistem Inovasi Daerah (SIDA) yang juga merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi berbasis potensi lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis strategi manajemen dengan konteks pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik dan tantangan unik, serta penyusunan model strategi inovasi yang aplikatif berdasarkan data empiris. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap dalam literatur yang selama ini kurang menyoroti penerapan manajemen inovasi secara sistematis di daerah yang memiliki tingkat inovasi rendah, sekaligus menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pengaruh strategi manajemen pemerintah daerah terhadap peningkatan inovasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan objektif tanpa melakukan intervensi terhadap variabel penelitian, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti (Hirawan & Nurasiatin, 2023). Selain itu, metode deskriptif sangat tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat “apa” dan “bagaimana” dalam konteks pengelolaan inovasi daerah, serta mampu memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis bukti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berjumlah 39 orang. Sampel diambil menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan responden (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Observasi dilakukan secara langsung di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk mengamati secara objektif bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan dalam mendorong inovasi daerah. Observasi ini bersifat partisipatif non-terstruktur, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak melakukan intervensi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat responden terhadap variabel strategi manajemen dan inovasi daerah. Pernyataan yang di gunakan dalam kuesioner ini mengadopsi indikator dari teori strategi manajemen George R. Terry untuk melihat pengaruhnya terhadap inovasi daerah di kabupaten sidenreng rappang (Syahputra & Aslami, 2023). Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala ini memudahkan pengukuran sikap secara kuantitatif sehingga hasilnya dapat dianalisis secara statistik (Prawira et al., 2021). Selain itu, studi pustaka dilakukan secara sistematis dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal, regulasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian strategi manajemen dan inovasi daerah. Studi pustaka ini berfungsi untuk memperkuat landasan teori serta memberikan konteks dan dukungan empiris terhadap analisis yang dilakukan dalam penelitian (Siti Romdona et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validasi

Tabel 1. Hasil Uji Validasi

Variabel	Item	r Hitung	Sig.	keterangan
Perencanaan (X1)	X1.1	0.885	0.000	Valid
	X1.2	0.843	0.000	Valid
Pengorganisasian (X2)	X2.1	0.883	0.000	Valid
	X2.2	0.913	0.000	Valid
Pengarahan (X3)	X3.1	0.850	0.000	Valid
	X3.2	0.903	0.000	Valid
Pengawasan (X4)	X4.1	0.866	0.000	Valid
	X4.2	0.867	0.000	Valid
Inovasi Daerah (Y)	Y1	0.785	0.000	Valid
	Y2	0.569	0.000	Valid
	Y3	0.655	0.000	Valid
	Y4	0.681	0.000	Valid
	Y5	0.710	0.000	Valid

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Nilai *r* hitung (*Pearson Correlation*) harus lebih besar dari 0,316 (nilai *r* tabel untuk N=39 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$), dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) harus kurang dari 0,05. Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka item dinyatakan valid. Pada tabel 1 uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi Pearson antara skor masing-masing item instrumen dengan skor total konstruk variabel terkait. Berdasarkan output SPSS, semua item pada variabel Perencanaan (X1) menunjukkan nilai korelasi yang tinggi dan signifikan, yaitu masing-masing sebesar 0,885 dan 0,843 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,000, sehingga kedua item ini valid untuk mengukur variabel Perencanaan. Selanjutnya, variabel Pengorganisasian (X2) juga menunjukkan validitas yang sangat baik dengan nilai korelasi item sebesar 0,883 dan 0,913 serta Sig. 0,000, menandakan bahwa kedua item tersebut valid dalam mengukur variabel Pengorganisasian.

Pada variabel Pengarahan (X3), kedua item juga memenuhi kriteria validitas dengan korelasi masing-masing 0,850 dan 0,903, serta nilai signifikansi yang sangat rendah (0,000), sehingga dapat dikatakan valid. Begitu pula pada variabel Pengawasan (X4), kedua item menunjukkan korelasi yang tinggi, yakni 0,866 dan 0,867, dengan Sig. 0,000, yang menunjukkan bahwa item pengawasan dapat diandalkan sebagai pengukuran variabel ini. Terakhir, pada variabel Inovasi Daerah (Y), seluruh item yang diuji memiliki nilai korelasi signifikan dengan skor total variabel, dengan angka korelasi bervariasi antara 0,569 hingga 0,785 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang berarti seluruh item tersebut valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perencanaan (X1)	2	0.657	Reliabel
Pengorganisasian (X2)	2	0.756	Reliabel
Pengarahan (X3)	2	0.694	Reliabel
Pengawasan (X4)	2	0.668	Reliabel
Inovasi Daerah (Y)	5	0.709	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen yang digunakan pada setiap variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis *Cronbach's Alpha*, variabel Perencanaan (X1) dengan 2 item pernyataan memiliki nilai alpha sebesar 0,657, yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang dapat diterima dan instrumen ini konsisten untuk mengukur aspek perencanaan dalam strategi manajemen pemerintah daerah. Selanjutnya, variabel Pengorganisasian (X2) dengan 2 item memperoleh nilai alpha 0,756, yang juga menunjukkan reliabilitas yang baik, menandakan bahwa item-item dalam pengorganisasian saling konsisten untuk menggambarkan konstruksi variabel tersebut. Variabel Pengarahan (X3), yang terdiri dari 2 item, memperoleh nilai alpha sebesar 0,694, semakin memperkuat konsistensi internal instrumen dalam mengukur pengarahan dalam strategi manajemen. Variabel Pengawasan (X4) menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,668 dengan 2 item, yang berarti instrumen pengawasan memiliki tingkat

reliabilitas yang dapat diterima dan dapat diandalkan dalam pengukuran. Terakhir, variabel Inovasi Daerah (Y) yang terdiri dari 5 item memiliki nilai reliabilitas 0,709, menunjukkan tingkat konsistensi yang baik untuk mengukur inovasi daerah sebagai hasil dari strategi manajemen pemerintah daerah. Secara keseluruhan, semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6, yang menandakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data serta analisis lebih lanjut pada studi strategi manajemen pemerintah daerah terhadap inovasi daerah.

Deskripsi Karakteristik Responden

1. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Responden	
		Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1	21-30	9	23,1%
2	31-40	9	23,1%
3	41-50	21	53,8%
4	51-60	10	25,6%
Total		39	100%

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Data tabel 3 menunjukkan sebagian besar responden berada pada rentang usia 41–50 tahun, yakni sebanyak 21 orang atau sekitar 53,8% dari total responden. Kelompok usia 21–30 tahun dan 31–40 tahun masing-masing menyumbang 23,1% (9 orang). Sementara itu, responden dengan usia 51–60 tahun berjumlah 10 orang atau sekitar 25,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dengan pengalaman kerja yang relatif matang.

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Responden	
		Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1	Perempuan	16	41,0%
2	Laki-laki	23	59,0%
Total		39	100%

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak, yaitu 23 orang atau 59,0%, dibandingkan responden perempuan yang berjumlah 16 orang atau sekitar 41,0%. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, laki-laki mendominasi jumlah partisipan.

3. Karakteristik responden berdasarkan Tingkat pendidikan

Tabel 5. Karakteristik responden berdasarkan Tingkat pendidikan

no	Tingkat pendidikan	Responden	
		Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1	S2	13	33,3%
2	S1	12	30,8%
3	D3	1	2,6%
4	SLTA	8	20,5%
5	SLTP	1	2,6%
Total		39	100%

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan 13 orang (33,3%) berpendidikan S2 dan 12 orang (30,8%) berpendidikan S1. Ini berarti lebih dari separuh responden merupakan lulusan perguruan tinggi. Responden dengan pendidikan SLTA sebanyak 8 orang (20,5%), sedangkan D3 dan SLTP masing-masing hanya 1 orang (2,6%). Temuan ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kompetensi akademik yang relatif baik.

Analisis Data

1. Hasil Uji-t

Table 6. Hasil Uji-t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.	keterangan
Perencanaan	4.102	2.023	0.000	signifikan
Pengorganisasian	9.947	2.023	0.000	signifikan
Pengarahan	5.455	2.023	0.000	signifikan
Pengawasan	6.659	2.023	0.000	signifikan

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Keterangan Penerimaan Hipotesis

- H1 (Perencanaan berpengaruh terhadap inovasi daerah) Nilai t hitung = 4,102 > t tabel = 2.023 dengan signifikansi 0.000 < 0.05, maka H1 diterima. Artinya, variabel Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap inovasi daerah.
- H2 (Pengorganisasian berpengaruh terhadap inovasi daerah) Nilai t hitung = 9.947 > t tabel = 2.023 dengan signifikansi 0.000 < 0.05, maka H2 diterima. Artinya, variabel Pengorganisasian berpengaruh signifikan terhadap inovasi daerah.
- H3 (Pengarahan berpengaruh terhadap inovasi daerah) Nilai t hitung = 5.455 > t tabel = 2.023 dengan signifikansi 0.000 < 0.05, maka H3 diterima. Artinya, variabel Pengarahan berpengaruh signifikan terhadap inovasi daerah.
- H4 (Pengawasan berpengaruh terhadap inovasi daerah) Nilai t hitung = 6.659 > t tabel = 2.023 dengan signifikansi 0.000 < 0.05, maka H4 diterima. Artinya, variabel Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap inovasi daerah.

Secara keseluruhan, semua hipotesis yang diajukan (H1 sampai H4) diterima karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, sehingga variabel Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi daerah.

2. Hasil Uji f

Table 7. Hasil Uji-f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.240	4	41.310	36.479	.000 ^b
	Residual	38.503	34	1.132		
	Total	203.744	38			
a. Dependent Variable: Inovasi Daerah						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan						

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, dengan nilai F hitung sebesar 36.479 dan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0.000. Karena nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa model regresi tidak signifikan. Dengan kata lain, variabel-variabel independen yang diuji (Pengawasan, Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengarahan) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Inovasi Daerah.

Nilai *Sum of Squares* untuk regresi adalah 165.240, yang menunjukkan variasi yang dijelaskan oleh model, sementara *Residual* sebesar 38.503 menunjukkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diuji memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi Inovasi Daerah, dan hubungan antar variabel dalam model tersebut memang signifikan.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.811	.789	1.06417
a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan				

Sumber: Data Primer, 2025 (dioalah)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,811. Nilai ini mengindikasikan bahwa sekitar 81,1% variasi atau perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan secara bersama-sama dalam model regresi yang digunakan. Sedangkan sisanya sebesar 18,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model atau variabel yang belum diteliti. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,789 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel, model masih mampu menjelaskan sekitar 78,9% variasi variabel dependen. Dengan demikian, model regresi ini memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa variabel-variabel pengelolaan tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Nilai standar error sebesar 1,06417 juga menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model tidak terlalu besar, sehingga hasil model dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan inovasi daerah. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen klasik George R. Terry yang menegaskan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, termasuk inovasi, sangat tergantung pada sinergi fungsi-fungsi manajerial tersebut (Syahputra & Aslami, 2023). Perencanaan yang sistematis memberikan arah strategis yang jelas bagi pemerintah daerah, menghindarkan kebijakan yang sporadis dan tidak terintegrasi seperti yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengorganisasian yang efektif memfasilitasi alokasi sumber daya yang tepat dan efisien, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Temuan ini memperkuat konsep *Regional Innovation System (RIS)* yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi struktur organisasi dalam mendukung proses inovasi (Witjaksono et al., 2020). Penelitian sebelumnya oleh (Rahmanda, 2023) juga menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat menjadi faktor kunci dalam mendukung inovasi daerah, sehingga pengorganisasian harus diperkuat sebagai fondasi.

Pengarahan sebagai fungsi manajemen berperan dalam penyelarasan visi dan tindakan, memastikan seluruh unit kerja dan staf memahami serta mendukung arah inovasi daerah. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengarahan yang jelas dan komunikatif dapat mempercepat adaptasi perubahan dan peningkatan kinerja inovatif. Studi oleh (Ratna et al., 2025) pada sektor swasta menunjukkan hasil serupa, yang menegaskan bahwa pengarahan yang efektif dapat memfasilitasi pencapaian tujuan inovasi secara lebih optimal.

Pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi yang penting untuk menjamin akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam proses inovasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang konsisten dan terstruktur mampu mengidentifikasi hambatan dan memberikan umpan balik strategis, sehingga inovasi dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hal ini sesuai dengan temuan (Sari, 2024) yang menekankan peran pengawasan dalam optimalisasi inovasi pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

Secara keseluruhan, nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,811$) mengindikasikan bahwa model manajemen strategis yang mengintegrasikan keempat fungsi tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi inovasi daerah. Namun, sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain, seperti kondisi sosial-ekonomi, budaya organisasi, dan dukungan teknologi, yang tidak diukur dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel tersebut secara lebih komprehensif.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini sangat signifikan bagi kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperkuat fungsi perencanaan inovasi dengan menyusun *Road Map* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang jelas dan terukur agar pengembangan inovasi tidak bersifat sporadis.

Selanjutnya, pengorganisasian internal harus diarahkan pada pengoptimalan sumber daya manusia dengan kompetensi inovasi yang memadai, termasuk pembentukan unit kerja khusus yang fokus pada pengelolaan inovasi. Pengarahan harus dilakukan secara efektif melalui komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana. Terakhir, mekanisme pengawasan yang berkelanjutan perlu diterapkan dengan indikator kinerja inovasi yang jelas agar akuntabilitas dan peningkatan mutu inovasi dapat dijaga secara konsisten. Hal ini akan memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi dinamika globalisasi dan transformasi digital yang semakin kompleks (Handayani et al., 2024).

Selain itu, kebijakan yang mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, perlu diintegrasikan ke dalam strategi inovasi daerah. Pendekatan *Regional Innovation System* menekankan pentingnya jaringan interaksi dan pertukaran pengetahuan yang intensif untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan (Witjaksono et al., 2020). Pemerintah daerah harus mengembangkan platform yang memfasilitasi komunikasi dan kerja sama ini.

Secara kebijakan, integrasi fungsi-fungsi manajerial dalam tata kelola inovasi menjadi kunci bagi reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi juga dapat menjadi model yang direplikasi oleh daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam percepatan inovasi daerah dan pemerataan pembangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen pemerintah daerah yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil analisis statistik mengungkapkan bahwa keempat variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan 81,1% variasi inovasi daerah, yang menegaskan pentingnya fungsi manajemen dalam mendorong inovasi publik secara efektif. Sedangkan sisanya sebesar 18,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model atau variabel yang belum diteliti. Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen strategis yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim inovasi yang adaptif dan berkelanjutan di pemerintahan daerah. Dengan kata lain, sinergi antara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan modal utama dalam meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi daerah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris terkait relevansi teori manajemen strategis George R. Terry dan pendekatan *Regional Innovation System* dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Implikasi praktisnya adalah perlunya integrasi fungsi manajemen secara strategis untuk memperkuat kapasitas inovasi dan menjawab tantangan pembangunan lokal yang dinamis. Keterbatasan penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah yang terbatas pada Kabupaten Sidenreng Rappang serta penggunaan metode kuantitatif yang kurang menggali aspek kontekstual secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan generalisabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Aji Nugroho, A., Sutrisno, E., & Ranintya Yusuf, R. (2020). Optimalisasi Layanan Kesehatan Melalui Inovasi Pelayanan Publik Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan (Optimizing Health Services Through Public Service Innovation Project Change In Leadership Training). *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdikan.v1i1.4>
- Bazhal, I. (2016). *The Theory of Economic Development of J.A. Schumpeter: Key Features*. 69883.
- Farhan, A. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia Public Service Innovations In Indonesia Local*. 7, 111–123.
- Febrianti, S. D., & Fanida, E. H. (2022). Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu Berbasis Nik (Sipandaunik) Di Kabupaten Ponorogo. *Publika*, 106, 739–752. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p739-752>
- Fitri, S. A., & Pradana, G. W. (2022). Inovasi Pelayanan E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi Kasus Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan). *Publika*, 835–850. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p835-850>

- Handayani, F., Wulandari, P., Rezeki, A., Sufianti, E., & Wijayanti, R. (2024). *Evaluasi Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Jumlah Donasi Pada Yayasan Tunas Mulia Bantargebang* *Evaluation of Fundraising Strategies in Increasing the Number of Donations fot Tunas Mulia Bantargebang Foundation*.
- Hirawan, Z., & Nurasiatini, D. (2023). Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.37950/wfaj.vi.1660>
- Ilham Syukri, L. M. (2023). *Manajemen Sarana Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Teknik Komputer dan Informasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Musi Rawas Ilham*. 1, 1–23.
- Maninggara, N., Kusharsantob, Z. S., Suhandojoc, & Maulidyad, D. (2023). *Model Pengukuran Implementasi Konsep Sistem Inovasi Daerah Di Indonesia*. 19(1), 87–104. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.44002>
- Prawira, M. F. A., Budisetyorini, B., Adisudharma, D., & Salam, D. A. (2021). Model Pengembangan Aktivitas Wisata di Kawasan Sungai Cilimbung Kabupaten Garut. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(2), 77. <https://doi.org/10.33370/jpw.v23i2.573>
- Rahmanda, A. R. (2022). Tata Kelola dan Tantangan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(02), 176–192. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i02.224>
- Rahmanda, A. R. (2023). Optimalisasi Peran Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Inovasi Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu* ..., 8(4), 1–13. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/27624%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/27624/12999>
- Ratna, D., Lestari, N. A., Septiana, T. A., & Sanjaya, V. (2025). *Jurnal Riset Akuntansi , Perpajakan dan Audting Pengaruh Manajemen Strategik Terhadap Keberhasilan Inovasi Produk Ice Cream Momoyo (Studi pada Ice Cream Momoyo di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung)*. 2(2), 71–76.
- Sari, Y. P. (2024). *Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar*. 1(1), 56–66.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, A. G. (2025). *Teknik Pengumpulan Data: Obsevasi, Wawancara dan Kuesioner*. 3(1), 39–47.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.
- Wardani, D. K., & Apriani, T. (2023). Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kota Bandung. *Matra Pembaruan*, 7(2), 125–135. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.125-135>
- Wismono, F. H., Wahyudi, A., Hidayah, K., Sartika, D., Fadhly, M., & Noor, A. (2019). *STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DI KOTA SAMARINDA*. 1, 60–75.
- Witjaksono, J., Rawung, J. B. M., Indrasti, R., & Tan, S. S. (2020). Role of the Innovation System in Supporting Regional Agriculture Development: Evidence from Southeast Sulawesi Province Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(5), 78–89. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0087>